

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Arus urbanisasi di kota-kota besar Indonesia telah memberi pengaruh besar terhadap perubahan sosial. Termasuk juga di Kota Bandung, urbanisasi telah menjadikan wilayah ini sangat heterogen baik suku, budaya, agama bahkan berbagai aliran kepercayaan. Berbagai suku bangsa yang ada di Kota Bandung seperti Batak, Minahasa, Minangkabau, Ambon, Cina, Jawa dan suku dominan yakni Sunda. Berbagai agama yang secara resmi diakui pemerintah Indonesia seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu, begitu juga berbagai keyakinan seperti Ahmadiyah dan Baha'i.¹ Keberagaman ini di satu sisi dapat menjadi potensi yang dapat menambah daya tarik Kota Bandung, namun di sisi lain juga dapat menjadi potensi konflik.

Pluralitas agama dan keyakinan sebagai salah satu sumber konflik ditunjukkan oleh jumlah pengaduan pelanggaran hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) yang diterima KOMNAS HAM pada Januari-Desember 2016 berjumlah 97 pengaduan. Dari jumlah pengaduan tersebut, Jawa Barat menjadi daerah dengan jumlah pengaduan tertinggi sebanyak 21 pengaduan.² Di Kota Bandung sendiri tercatat berbagai kebijakan yang diskriminatif terhadap warga Jaringan Ahmadiyah Indonesia. Permasalahan perijinan pembangunan gereja GBKP Bandung Timur, gereja GBKP Bandung Barat, gereja Rehoboth, gereja BNKP Nias, gereja Masehi Advent Hari Ke-Tujuh, dan gereja Kerajaan Mulia. Pembubaran kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) umat Kristen di gedung Sabuga jalan Tamansari pada 6 Desember 2016.

Dalam laporan tahunan kehidupan keberagaman tahun 2016, indeks kerukunan hidup umat beragama di Provinsi Jawa Barat berada pada angka 63,39% dibawah indeks kerukunan nasional yakni 67,65%. Angka indeks kerukunan ini diperoleh dari hasil pengukuran 3 (tiga) indikator yaitu: toleransi,

¹Badan Pusat Statistik Kota Bandung, *Kota Bandung dalam Angka*, (Bandung: Pemkot Bandung, 2017), 102.

²Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 2016*, (Jakarta: 2016), 14-15.

kesetaraan dan kerjasama.³ Peningkatan kerukunan umat beragama, orientasinya tidak hanya pada aspek toleransi semata karena sikap toleransi itu baru merupakan syarat awal agar kerukunan umat beragama tumbuh semakin kuat, maka toleransi harus disertai dengan adanya sikap kesetaraan. Sikap kesetaraan juga harus diiringi tindakan nyata dalam berkerjasama di tengah masyarakat majemuk.

Berbeda dengan penelitian Rina Hermawati dkk, indeks toleransi Kota Bandung menunjukkan kategori “tinggi”, yakni berada pada angka 3,82. Ini mengindikasikan bahwa interaksi sosial antarumat beragama di Kota Bandung telah berlangsung secara baik dan berada dalam batas-batas jarak sosial yang wajar.⁴ Capaian ini menunjukkan bahwa persepsi, sikap, dan kerja sama dalam interaksi sosial antarumat beragama di Kota Bandung sudah berlangsung secara kondusif. Jarak sosial yang ada masih tergolong wajar karena kecenderungan penolakan terhadap pemeluk agama berbeda hanya berkaitan dengan ranah yang sangat pribadi atau berkaitan dengan identitas *in-group* dari suatu pemeluk agama. Dalam hal interaksi sosial lainnya, ada keterbukaan untuk menerima dan bergaul dengan pemeluk agama yang berbeda.

Perbedaan temuan di atas perlu disikapi dengan bijak, bukan dengan mempersoalkan keabsahan temuan yang dihasilkan, tapi dengan memaknai temuan tersebut sebagai indikasi bahwa masih terdapat potensi konflik dalam hubungan antar umat beragama di Kota Bandung. Berbagai studi yang dipaparkan di atas menunjukkan bahwa kerukunan umat beragama, termasuk sikap toleransi yang menjadi indikator dari kerukunan tersebut, masih menjadi persoalan bagi Kota Bandung. Walaupun dengan data yang ditunjukkan oleh penelitian Rina Hermawati dkk yang menilai positif indeks toleransi Kota Bandung. Meskipun demikian, mengingat beragam persoalan kerukunan hidup umat beragama ini tetap perlu ditangani agar potensi konflik yang mungkin muncul dapat dicegah.

Masyarakat dan pemerintah Kota Bandung harus mengatur dan mencari solusi agar tercipta kedamaian pasca konflik dan membangun kedamaian dan

³Departemen Agama RI, *Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan Tahun 2016*, Badan Penelitian dan Pengembangan, (Jakarta: 2017), 12-14.

⁴Rina Hemawati, dkk, Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Bandung, dalam *Jurnal UMBARA: Indonesian Journal of Anthropology*, Vol. 1, No.2 Desember 2016.

menyadari perbedaan sebelum terjadinya konflik. Oleh karena itu, seluruh komponen masyarakat Kota Bandung dituntut untuk mencari titik-titik tertentu yang memungkinkan adanya titik temu atau paling tidak kebersamaan, sehingga terbuka peluang untuk tumbuhnya sikap toleran dalam menyikapi pluralitas Kota Bandung. Dalam kondisi objektif inilah dialog antar umat beragama diperlukan.

Secara historis gerakan dialog keagamaan di Indonesia dilatarbelakangi oleh peristiwa Meulaboh Pada Juli 1967. Sebuah gereja di Meulaboh Aceh Barat dibakar oleh penduduk muslim setempat. Peristiwa ini terjadi karena pembangunan gereja tersebut diyakini didukung penduduk keturunan Tionghoa yang baru memeluk agama Kristen. Kemarahan kaum muslimin dipicu oleh kenyataan bahwa gereja tersebut dibangun di tengah pemukiman muslimin yang hanya dihuni oleh sejumlah kecil umat Kristiani. Peristiwa konflik juga terjadi di Makasar Sulawesi Selatan, pada 1 Oktober 1967, beberapa pemuda muslim merusak sekitar 20 gereja dan sekolah Katolik dan Protestan, serta membakar puluhan Injil, peristiwa ini dianggap dipicu oleh seorang guru Protestan yang membuat pernyataan yang menghina agama dan umat Islam.⁵

Menanggapi peristiwa konflik di atas KAMI (Komite Aksi Mahasiswa Indonesia), mengirim surat terbuka kepada pejabat Presiden Soeharto agar menghentikan konflik tersebut dengan cara membentuk sebuah lembaga konsultasi untuk mendiskusikan toleransi antar umat beragama. Atas tuntutan tersebut, Menteri Agama K.H Mohammad Dachlan melaksanakan Musyawarah Antarumat Beragama pada tanggal 30 November 1967 di gedung Dewan Pertimbangan Agung Jakarta. Dihadiri oleh sekitar 20 tokoh Muslim, Protestan dan Katolik. Diadakannya Musyawarah Antaraumat beragama tersebut karena pada saat itu timbul berbagai ketegangan antar berbagai agama di Indonesia, terutama antara Islam dan Kristen/Katolik, yang jika tidak segera diatasi akan dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Dialog antarumat beragama pada masa Orde Baru dilakukan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mengontrol kehidupan

⁵J.B. Banawiratma, dkk, *Dialog Antarumat Beragama; Gagasan Dan Pratik Di Indonesia*, (Jakarta: Mizan Publika, 2010), 38.

umat beragama. Hal ini dilakukan agar umat beragama tidak terlibat secara politis dan tidak terlibat konflik yang dapat menggoyangkan kekuasaan Orde Baru. Kebijakan pemerintahan Orde Baru terhadap dialog antarumat beragama juga sebagai usaha untuk mendapatkan dukungan dari para pemuka agama. Pemerintahan Orde Baru kurang tertarik untuk mengupayakan suasana dialog antarumat beragama yang didasarkan pada penyebaran nilai-nilai keadilan secara serius dan berkesinambungan.

Karena itu, sebagai suatu gerakan yang merespon konsep dan praktek dialog antarumat beragama yang diperkasai oleh pemerintah, beberapa lembaga non pemerintah mengambil inisiatif untuk dialog antarumat beragama. Gerakan dialog keagamaan yang dilakukan sebenarnya merupakan respon kritis atas keyakinan bahwa upaya yang telah dilakukan pemerintah selama ini mengalami kegagalan. Sehingga diperlukan pendekatan yang berbeda dalam memahami dialog antarumat beragama. Salah satu kelompok yang konsentrasi terhadap dialog keagamaan ialah Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (JAKATARUB) Kota Bandung.

JAKATARUB didirikan bermula dari serangkaian workshop tentang keberagaman dan toleransi yang diadakan *Institute for Culture and Religion Studies* (INCRoS) dan Masyarakat Dialog Antar Agama (MADIA) pada 10-12 November 2000 di Pesantren Al-Wasilah, Garut. Selanjutnya workshop dilaksanakan kembali pada 20-22 April 2001 di Vihara Vipassana Graha, Lembang. Rangkaian workshop ini muncul atas niatan para tokoh agama serta budayawan nasional dari Jawa Barat yang disokong oleh alm. K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Tujuan diadakannya workshop adalah demi mendorong kerukunan agama dalam konteks pengenalan yang mendalam sekaligus kerja sama yang strategis. Workshop ini dihadiri oleh sejumlah pemimpin agama dan kaum muda dari berbagai komunitas keagamaan di Jawa Barat.

Para peserta workshop kemudian bersepakat untuk membentuk suatu jaringan kerja antar umat beragama. sehingga pada 12 Mei hingga 30 Juni 2001 diadakan beberapa kali pertemuan berkala yang difasilitasi Gereja Katolik Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria, Bandung untuk mendiskusikan pendirian

jaringan tersebut. Pada pertemuan ketiga tersebut mulai dibicarakan tentang format atau wadah demi keberlangsungan kerja transformatif dialog antaragama, yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya JAKATARUB.

JAKATARUB merupakan sebuah nama yang di dalamnya bersemayam 'nilai' semangat yang selalu ingin berbuat. Sebuah nama yang ingin menebus harapan dan cita-cita kedamaian umat manusia dengan kesungguhan untuk melakukan sesuatu. Sebuah ikhtiar yang diidealisasikan untuk membawa kehidupan beragama ke arah yang lebih terbuka, santun, beradab, dan mampu turut menciptakan kedamaian sosial, keadilan manusia, dan kebersamaan dalam keragaman.⁶

JAKATARUB bersifat independen, tidak berafiliasi dengan partai politik atau ada di bawah lembaga lainnya. JAKATARUB bertujuan untuk menghadirkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama dengan pengenalan yang mendalam antar satu sama lain. Jaringan ini menekankan pergerakannya pada bidang budaya dan penguatan kesadaran masyarakat. Sejak tahun 2014 JAKATARUB memusatkan semua aktivitas dan programnya pada empat tema, yaitu: Diskusi teologis, Elaborasi Seni dan Budaya, Kampanye Media dan Pengayaan Konsep dan Wawasan Kebangsaan. Keempat tema ini bertujuan untuk memperluas serta memperdalam pemaknaan toleransi di berbagai segmen masyarakat dengan melibatkan banyak komunitas dan individu dalam mengerjakannya. Saat ini JAKATARUB telah bermitra aktif dengan 10 Lembaga Keagamaan, 11 Lembaga/komunitas kebudayaan dan beberapa lembaga swadaya masyarakat serta lembaga pendidikan.⁷

Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan terkait gerakan dialog keagamaan yang dilaksanakan oleh JAKATARUB ini. Terutama bagaimana menjelaskan gerakan dialog keagamaan JAKATARUB dalam prespektif teori gerakan sosial. Strategi dan taktik seperti apa yang dilakukan aktivis gerakan dialog keagamaan JAKATARUB untuk menggapai tujuannya.

⁶Anik Farida, Manajemen Konflik Keagamaan Melalui Jaringan Kerja Antar Umat Beragama Di Bandung Jawa Barat, dalam *jurnal Al-Qalam* Vol. 21, No. 1, Juni 2015.

⁷Firman Sebastian. "Tentang Jaringan Kerja Antarumat Beragama" lihat di <http://jakatarub.org/tentang-kami/> (diakses tanggal 28 November 2017).

Serta faktor-faktor apa yang menghambat dan mendukung gerakan dialog keagamaan yang dilakukan oleh JAKATARUB. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, penulis akan menganalisis gerakan dialog keagamaan JAKATARUB menggunakan dua teori yakni teori mobilisasi sumberdaya dan teori proses framing.

Teori mobilisasi sumberdaya digunakan untuk memahami basis rasionalitas gerakan dialog keagamaan yang dilakukan oleh JAKATARUB. Teori mobilisasi sumberdaya juga digunakan untuk melihat bagaimana JAKATARUB memobilisasi sumberdaya yang mereka miliki. Sedangkan teori proses framing digunakan untuk memahami bagaimana para aktor gerakan dialog keagamaan JAKATARUB Kota Bandung dalam membingkai isu-isu seperti toleransi, kebebasan beragama, demokrasi dan perdamaian. Sejauh mana isu-isu tersebut disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat atau kelompok sasaran.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah disampaikan di atas, karenanya perlu untuk melakukan penelitian lebih komperensif terhadap gerakan dialog keagamaan yang digagas dan dipraktikkan oleh JAKATARUB Kota Bandung. Oleh karena itu, dilakukanlah penelitian ini yang berjudul **Gerakan Dialog Keagamaan Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (JAKATARUB) dan Kontribusinya Terhadap Kerukunan Hidup Umat Beragama di Kota Bandung.**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan judul di atas, maka fokus masalah yang hendak peneliti kaji dalam tesis ini adalah bagaimana menjelaskan gerakan dialog keagamaan JAKATARUB dalam prespektif teori gerakan sosial. Karena itu ada tiga pertanyaan yang dijadikan fokus pembahasan dalam tesis ini, yaitu:

1. Apa strategi dan taktik yang dilakukan aktivis gerakan dialog keagamaan JAKATARUB untuk menggapai tujuannya.?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat dan mendukung gerakan dialog keagamaan JAKATARUB.?

3. Apa kontribusi gerakan dialog keagamaan JAKATARUB terhadap kerukunan hidup umat beragama di Kota Bandung.?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui strategi dan taktik yang dilakukan aktivis gerakan dialog keagamaan JAKATARUB dalam menggapai tujuan gerakannya
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat gerakan dialog keagamaan JAKATARUB
3. Untuk mengetahui kontribusi gerakan dialog keagamaan JAKATARUB terhadap kerukunan hidup umat beragama di Kota Bandung

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumbang karya ilmiah bagi pengembangan pendidikan dan keilmuan di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung khususnya dan masyarakat pada umumnya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak – pihak terkait untuk merumuskan kebijakan dalam pelaksanaan dialog keagamaan di Indonesia
3. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi penelitian serupa selanjutnya.
4. Bagi penulis secara pribadi, sungguh sangat berguna karena merupakan bentuk pengembangan wawasan dalam ilmu keagamaan. Serta merupakan pengalaman dalam menyusun tesis sebagai bentuk karya ilmiah yang diujikan dan merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di program studi Religion Studies Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

D. Tinjauan Pusaka

Sudah ada beberapa penelitian terkait dengan Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (JAKATARUB) Kota Bandung. Dari berbagai tinjauan pustaka, ada

beberapa karya ilmiah yang akan disampaikan pada bagian ini. Pertama, adalah penelitian Tennille Bernhard yang berjudul *“Kaum Muda dan Dialog Lintas Iman; Bagaimana Kaum Muda Dapat Memberi Kontribusi untuk pembangunan Toleransi Beragama di Indonesia.?”* ditulis pada tahun 2014. Dalam penelitian ini Tennille Bernhard fokus pada kaum muda dan dialog lintas iman. Objek penelitian juga tidak hanya pada JAKATARUB, namun beberapa komunitas lintas iman seperti Institut Dialog Antar Iman (DIAN/Interfidei), Gusdurian, Komunitas Peacemaker Kupang (KOMPAK), Pemuda Lintas Iman Cirebon (PELITA), American Friends Service Committee (AFSC), dan Bandung Lautan Damai (BALAD).⁸

Hasil penelitian Tennille ini menunjukkan dialog lintas agama berdampak besar pada kaum muda. Dialog lintas agama memberikan kesempatan bagi kaum muda untuk bergaul dengan orang lain agar membahas sistem keyakinan berbeda di lingkungan yang mendukung. Dengan belajar tentang sistem keyakinan yang berbeda kaum muda mengembangkan *religious literacy* serta pemahaman tentang masalah yang dihadapi oleh kelompok minoritas. Selain itu, dialog lintas agama juga dapat memberdayakan dan mengilhami kaum muda untuk membuat kelompok lintas agama di komunitas sendiri.

Kedua ialah tesis mahasiswa program Magister Teologi Universitas Katolik Parahyangan yang ditulis oleh Bonifatius Haryo Wicaksono berjudul *“Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (JAKATARUB) Dilihat Dari Perspektif Ajaran Gereja Katolik”* pada tahun 2015. Dalam tesis ini menjelaskan bagaimana

⁸Tennille Bernhard, *Kaum Muda dan Dialog Lintas Iman; Bagaimana Kaum Muda Dapat Memberi Kontribusi untuk pembangunan Toleransi Beragama di Indonesia.?*, (Yogyakarta: 2014)

perspektif gereja Katolik terhadap Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (JAKATARUB).⁹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif antar ajaran Gereja Katolik dengan komunitas seperti JAKATARUB. Dalam ajaran Gereja Katolik, komunitas lintas iman seperti JAKATARUB berperan penting dalam menjaga hubungan baik antar umat beragama.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Anik Farida berjudul “*Manajemen Konflik Keagamaan Melalui Jaringan Kerja Antar Umat Beragama Di Bandung Jawa Barat*”. Penelitian ini diterbitkan dalam jurnal *Al-Qalam* Volume 21 Nomor 1 pada Juni 2015. Fokus penelitian ini ialah melihat JAKATARUB sebagai satu kelompok masyarakat yang memiliki kapasitas untuk melakukan upaya manajemen konflik dengan cara merevitalisasi pranata sosial budaya yang merupakan unsur kultural yang hidup dan tumbuh di masyarakat.¹⁰ Hasil penelitian ini menunjukkan model pengelolaan (manajemen) konflik bernuansa keagamaan yang dilakukan di Jawa Barat, terutama di Kota Bandung, adalah dengan munculnya komunitas jejaring warga (civic Network) seperti JAKATARUB kota Bandung. Komunitas seperti JAKATARUB ini berperan penting sebagai simpul bertemunya berbagai kelompok yang berbeda-beda. Kehadiran jejaring warga, seperti JAKATARUB merupakan alternatif di tangan hilangnya ruang-ruang bagi interaksi warga yang dulu terwadahi dalam hubungan komunal.

⁹Bonifatius Haryo Wicaksono, *Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (JAKATARUB) Dilihat Dari Perspektif Ajaran Gereja Katolik*, (Bandung: Universitas Katolik Parayangan, 2015).

¹⁰Anik Farida, *Manajemen Konflik Keagamaan Melalui Jaringan Kerja Antar Umat Beragama Di Bandung Jawa Barat*, dalam *jurnal Al-Qalam* Vol. 21, No. 1, Juni 2015.

Berbagai penelitian terkait dengan konsep dialog keagamaan juga telah banyak yang meneliti dan telah dipublikasi. Diantaranya, penelitian yang dilakukan Nasaruddin Umar dengan judul “*Interfaith Dialog dalam Mengembangkan Kehidupan beragama yang Harmoni dan Damai*”. Penelitian ini diterbitkan dalam jurnal *Bimas Islam* Vol.6 No.III tahun 2013. Penelitian ini merupakan penelitian bersifat teroris, di dalamnya tertulis seruan agar seluruh komponen bangsa Indonesia, termaksud masyarakat Indonesia itu sendiri, agar mengamalkan ajaran mulia agama dan membangun misi kehidupan beragama yang harmonis dan damai.¹¹ Dalam kesimpulan penelitian ini disampaikan bahwa membangun kehidupan keagamaan yang damai tidak hanya tugas pemerintah atau kalangan tertentu saja. Seluruh elemen umat beragama memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dalam mengemban misi mulia ini. selain mengamalkan ajaran mulia agama, misi membangun kehidupan beragama yang harmoni dan damai juga menjadi amanat Undang-Undang yang telah digariskan oleh para pendiri bangsa Indonesia.

Pada jurnal yang sama juga, penelitian yang dilakukan oleh Aan Rukmana yang berjudul “*Islam dan Dialog Antar Agama di Indonesia: dari Dialog Teologis Menuju Dialog Antropologis.*” Penelitian ini mencoba untuk membedah pendekatan baru dialog antaragama dari konteks teologis menjadi antropologis. Dialog antropologis mengasumsikan bahwa dialog dalam aktivitas seperti membantu orang yang membutuhkan, menghapus kemiskinan dimasyarakat

¹¹Nasaruddin Umar, *Interfaith Dialog dalam Mengembangkan Kehidupan beragama yang Harmoni dan Damai*, dalam *jurnal Bimas Islam* Vol.6, No.III tahun 2013.

dan masalah sosial lainnya.¹² Hasil dari penelitian ini ialah penegasan bahwa saat ini konsep dialog antar agama di Indonesia sudah semestinya tidak hanya pada dialog teologis semata. Namun dialog di Indonesia mesti menuju dalam dialog yang bersifat antropologis. Dialog yang berangkat dari realitas kemanusiaan sendiri. Orientasi dialog mesti diarahkan untuk membebaskan umat manusia dari kemiskinan, penyakit dan juga penderitaan.

Untuk memperdalam analisa terkait gerakan dialog keagamaan ini, peneliti juga menemukan berbagai tinjauan pusaka yang terkait dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Diantaranya ialah penelitian yang dilakukan Joko Suwarno yang berjudul “*Gerakan Muncar Rumahku dan Strategi Mobilisasi Sumber Daya pada Gerakan Sosial Penyelamat Lingkungan.*” Dalam penelitiannya, Joko memaparkan teori mobilisasi sumber daya terdiri dari mobilisasi sumber daya moral, sumber daya budaya, sumber daya organisasi sosial, sumber daya manusia dan sumber daya material.¹³ Berdasarkan pendekatan teori mobilisasi sumberdaya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Gerakan Muncar Rumahku (Gemuruh) bukan hanya bertujuan untuk memberdayakan para nelayan bagi peningkatan kehidupan ekonomi mereka semata. Melainkan juga sebagai pemberdayaan (literasi melalui pengetahuan dan praktik serta berorganisasi) yang ditujukan agar para nelayan memiliki pengetahuan yang memadai. Sehingga para nelayan tersebut dapat memelihara keseimbangan lingkungan hidup yang menjadi sumber mata pencaharian mereka.

¹²Aan Rukmana, Islam dan Dialog Antar Agama di Indonesia: dari Dialog Teologis Menuju Dialog Antropologis, dalam *jurnal Bimas Islam* Vol.6, No.III tahun 2013.

¹³Joko Suwarno, Gerakan Muncar Rumahku dan Strategi Mobilisasi Sumber Daya pada Gerakan Sosial Penyelamat Lingkungan, dalam *jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol.3, No 2, Agustus 2016

Penelitian yang dilakukan oleh Luna Febriani yang berjudul “*Mobilisasi Sumberdaya dalam Gerakan Literasi (Studi pada Gerakan Vespa Pusaka)*.” Tujuan penelitian ini ialah untuk melihat bentuk mobilisasi sumber daya yang digunakan oleh Vespa Pusaka dalam melakukan gerakannya. Adapun mobilisasi sumber daya yang dilakukan oleh gerakan Vespa Pusaka antara lain sumber daya moral yang merupakan dukungan-dukungan simpati dan dukungan tokoh-tokoh terkenal yang ada di Toboali dan Bangka Selatan. Serta pemimpin dan kepemimpinan dalam gerakan literasi Vespa Pusaka yang menjadi faktor yang membuat Vespa Pusaka tetap eksis.¹⁴

Penelitian lain yakni penelitian yang ditulis oleh Dewi Karina Sari yang berjudul “*Strategi Mobilisasi Gerakan Masyarakat dalam Menutup Industri Pengelolaan Limbah B3 di Desa Lakardowo Kabupaten Mojokerto*.” Penelitian ini mengkaji strategi gerakan sosial masyarakat dalam memperjuangkan pemulihan lingkungan dan penutupan pabrik pengolahan limbah B3. Dianalisis dengan menggunakan teori mobilisasi sumber daya oleh McCarthy dan Zald. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemanfaatan jejaring dengan pemerintah, media, NGO, menjadi kunci keberhasilan gerakan sosial masyarakat desa Lakardowo dalam memperjuangkan pemulihan lingkungan dan penutupan pabrik pengolahan limbah B3.¹⁵

Berbeda dari beberapa penelitian yang ada, yang dimaksud penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian yang fokus bagaimana menjelaskan gerakan dialog

¹⁴Luna Febriani, *Mobilisasi Sumberdaya dalam Gerakan Literasi (Studi pada Gerakan Vespa Pusaka)*, dalam *jurnal Society*, Vol.5, No.1, Tahun 2017

¹⁵Dewi Karina Sari, *Strategi Mobilisasi Gerakan Masyarakat dalam Menutup Industri Pengelolaan Limbah B3 di Desa Lakardowo Kabupaten Mojokerto*, dalam *jurnal Politik Indonesia*, Vol.2, No.1, Juli-September 2017

keagamaan JAKATARUB dalam prespektif teori gerakan sosial. Strategi dan taktik seperti apa yang dilakukan aktor-aktor JAKATARUB untuk menggapai tujuannya. Serta faktor-faktor apa yang menghambat dan mendukung gerakan dialog keagamaan yang dilakukan oleh JAKATARUB.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam upaya menganalisis dan memahami gerakan sosial pada masyarakat kontemporer dapat melalui pendekatan teori mobilisasi sumberdaya dan teori proses framing. Teori mobilisasi sumberdaya memfokuskan analisisnya pada seperangkat proses kontekstual mengenai pengelolaan sumberdaya, dinamika organisasi dan perubahan politik, yang membuat gerakan sosial untuk mengoptimalkan potensi-potensi struktural yang dimiliki guna mencapai tujuannya. Pendekatan ini berusaha menganalisis bagaimana para aktor gerakan sosial mengembangkan strategi dan taktik dalam berinteraksi dengan lingkungannya untuk memperjuangkan tujuan gerakan mereka. Sedangkan teori proses framing digunakan untuk memahami bagaimana para aktor gerakan sosial dalam membingkai isu sosial yang relevan dengan gerakan mereka. Sejauh mana isu-isu sosial tersebut disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat atau kelompok sasaran.

Sebelum menjelaskan lebih jauh kedua teori yang menjadi pisau analisis dalam penelitian ini, akan terlebih dahulu dipaparkan pengertian dari gerakan sosial. Hal ini penting agar pembaca dapat memperoleh batasan yang dimaksud penulis. Pengertian gerakan sosial dalam penelitian ini lebih fokus pada hubungan antara gerakan sosial dan masyarakat sipil. Namun sebelum itu akan dipaparkan terlebih dahulu pengertian gerakan sosial menurut para ahli yang penulis temukan dari berbagai literatur.

Anthony Giddens mendefinisikan gerakan sosial sebagai suatu upaya kolektif untuk mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif diluar lembaga-lembaga yang mapan.¹⁶ Senada dengan Giddens, Sydney Tarrow mendefinisikan

¹⁶Anthony Giddens, *Sociology*, (Oxford: Polity Press, 1993), 642.

gerakan sosial sebagai tantangan-tantangan kolektif yang didasarkan pada tujuan-tujuan bersama dan solidaritas sosial, dalam interaksi berkelanjutan dengan para elit, penentang dan pemegang kekuasaan.¹⁷ Tarrow menekankan bahwa pada dasarnya gerakan sosial memiliki empat karakteristik yaitu: pertama, menyusun aksi melawan kelompok elit, penguasa, atau kelompok lainnya serta aturan-aturan budaya tertentu. Kedua, dilakukan atas nama tuntutan yang sama terhadap lawan, penguasa dan kelompok elit. Ketiga, berakar pada rasa solidaritas atau identitas kolektif. Dan keempat, terus melanjutkan aksi kolektifnya sampai terjadi perubahan sosial.¹⁸

Metta Spencer menyatakan bahwa yang dimaksud gerakan sosial adalah upaya kolektif yang ditujukan untuk suatu perubahan tatanan kehidupan yang baru.¹⁹ Ciri utama dari pandangan Spencer ini adanya upaya kolektif dan upaya tersebut diarahkan agar terjadinya suatu perubahan tatanan yang lebih baik dari pada tatanan yang sudah ada. Senada dengan Spencer, John Macionis menyatakan bahwa gerakan sosial merupakan aktivitas yang diorganisasikan bertujuan untuk mendorong atau menghambat perubahan sosial. Dari pengertian gerakan sosial yang dikemukakan oleh Macionis ini, ada dua ciri utama gerakan sosial yaitu adanya aktivitas yang diorganisir dan adanya tujuan yang berkaitan dengan suatu perubahan sosial.

Sedangkan David A. Locher berpendapat bahwa ketika sekelompok orang mengatur diri dalam upaya untuk mendorong atau menghambat perubahan sosial, maka mereka sedang menciptakan sebuah gerakan sosial.²⁰ Orang-orang yang sedikit atau banyak dengan kekuatan politik yang dimilikinya, kemudian mereka bergabung secara bersama-sama untuk memperjuangkan suatu perubahan. Maka mereka sedang melakukan perubahan sosial. Menurut Locher, sebagian besar teoritis perilaku kolektif memandang gerakan sosial sebagai suatu tipe dari

¹⁷Sidney Tarrow, *Power in Movement: Social Movement, Collective Action, and Politics*, (New York: Cambridge University Press, 1994), 4.

¹⁸Sidney Tarrow, *Power in Movement...*, 5.

¹⁹Oman Sukmana, *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*, (Malang: Intrans Publishing, 2016), 4.

²⁰David A. Locher, *Collective Behavior*, (New Jersey: Prentice Hall, 2002), 231.

perilaku kolektif. Tetapi banyak teoritis gerakan sosial memandang bahwa gerakan sosial merupakan fenomena yang terpisah dari perilaku kolektif.

Lebih jauh Iwan Gardono Sujatmiko menghubungkan masyarakat sipil (*civil Society*) dalam memberi pengertian terhadap gerakan sosial. Menurut Iwan Gardono, gerakan sosial merupakan gerakan yang berkaitan dengan aksi organisasi atau kelompok masyarakat sipil dalam mendukung atau menentang perubahan sosial.²¹ Namun yang masih perlu diperjelas adalah gejala sosial di luar gerakan sosial itu apa saja, sehingga kita dapat mempunyai peta dan mengetahui apakah sesuatu itu dapat dikategorikan sebagai gerakan sosial atau tidak?. Seperti yang diketahui seringkali ada pembagian ranah antara negara, perusahaan atau pasar dan masyarakat sipil. Berdasarkan pembagian ini maka terdapat pula “gerakan politik” yang berada di ranah negara dan gerakan ekonomi di ranah perusahaan atau pasar.

Pembagian ini telah dibahas juga oleh Sidney Tarrow yang melihat “*political parties*” berkaitan dengan gerakan politik yakni sebagai upaya perebutan dan penguasaan jabatan politik oleh partai politik melalui pemilu. Sementara itu, gerakan ekonomi berkaitan dengan lobby dimana terdapat upaya melakukan perubahan kebijakan publik tanpa berusaha menduduki jabatan publik tersebut guna mendapatkan keuntungan secara ekonomi.²² Selain itu, perbedaan ketiga ranah tersebut dibahas juga oleh Habermas yang melihat gerakan sosial baru merupakan perlawanan progresif terhadap invasi negara dan sistem ekonomi. Jadi, salah satu faktor yang membedakan ketiga gerakan tersebut adalah aktornya yakni partai politik di ranah politik, perusahaan di ekonomi (pasar) dan organisasi masyarakat sipil atau kelompok sosial di ranah masyarakat sipil.

Memahami pengertian dan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gerakan sosial merupakan upaya kolektif masyarakat sipil yang berdasarkan solidaritas sosial guna mencapai perubahan tatanan yang lebih baik dibandingkan dengan tatanan yang sudah ada.

²¹Pengantar Iwan Gardono Sijatmiko, “Gerakan Sosial dalam Dinamika Masyarakat”, dalam buku Darmawan Triwibowo (ed.), *Gerakan Sosial; Wahana Civil Society bagi Demokratisasi*, (Jakarta: Pusaka LP3ES, 2006), xvi.

²²Darmawan Triwibowo (ed.), *Gerakan Sosial...*, xvii.

Teori mobilisasi sumberdaya pertama kali diperkenalkan oleh Antony Oberschall. Oberschall mengkritik teori masyarakat masa yang dikembangkan Kornhauser yang pada waktu itu merupakan perspektif yang sangat dominan dalam mengkaji gerakan sosial. Menurut Oberschall, teori masyarakat masa tidak mampu menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi dalam gerakan anti-demokrasi, seperti Gerakan Nazi di Jerman.²³ Teori mobilisasi sumberdaya memfokuskan perhatiannya pada proses-proses sosial yang memungkinkan muncul dan berhasilnya suatu gerakan. Teori mobilisasi sumberdaya lebih banyak memberikan perhatian terhadap faktor-faktor ekonomi dan politik, serta kurang memberikan perhatian terhadap sifat-sifat psikologis dari anggota gerakan. Teori mobilisasi sumberdaya juga dibangun tidak didasarkan atas asumsi bahwa terdapat motivasi individu ketika bergabung dalam suatu gerakan.

Istilah Mobilisasi (*mobilization*) mengacu kepada proses pembentukan kerumunan, kelompok, asosiasi, dan organisasi untuk mencapai suatu tujuan kolektif. Teori mobilisasi sumber daya berasumsi bahwa dalam suatu masyarakat dimana muncul ketidakpuasan maka cukup memungkinkan untuk memunculkan sebuah gerakan sosial. Faktor organisasi dan kepemimpinan merupakan faktor yang dapat mendorong dan menghambat suatu gerakan sosial.

Menurut Klandermans, dengan mengutip pendapat Oberschall, Gamson, Marx dan Wood, McCarhty dan Zald, dan Sow, menyatakan bahwa teori mobilisasi sumber daya menekankan pada pentingnya faktor-faktor struktur (*struktur factors*), seperti ketersediaan sumberdaya untuk kolektivitas dan posisi individu dalam jaringan sosial, serta menekankan rasionalitas tentang partisipasi dalam suatu gerakan sosial.²⁴ Pada penelitian McCarthy dan Zald (1996), dapat disimpulkan pada dasarnya mereka memiliki pandangan bahwa ketidakpuasan tidak selalu melahirkan protes karena individu merupakan aktor rasional (mempertimbangkan *cost* dan *benefit*).²⁵

²³David A. Locher, *Collective Behavior...*, 258.

²⁴Bert Klandermans, *The Social Psychology of Protest*, (Cambridge: MA Blackwell, 1997)

²⁵John D. McCarthy and Mayer N. Zald, *Resoure Mobilization and Social Movements: A Partial Theory*, dalam jurnal *The American Journal of Sociology*, Vol.82, No.6 May 1977, 1212-1241. Lihat juga dalam Doug McAdam, John D. McCarthy, dan Mayer N. Zald,

Beberapa teoritis telah melakukan kajian untuk memahami basis rasionalitas partisipasi dalam suatu gerakan sosial. Misalnya, Olson yang menyatakan bahwa untuk dapat memahami mengapa individu terlibat dalam suatu perilaku kolektif maka harus dianalisis tentang konsep imbalan dan biaya (*reward and cost*).²⁶ Berbagai bentuk biaya yang dihubungkan dengan partisipasi terhadap gerakan sosial meliputi antara lain, waktu, uang, keamanan personal, dan hilangnya pekerjaan. Lebih jauh Olson berpendapat bahwa gerakan sosial harus mampu menawarkan pilihan insentif seperti prestise, gaji, dan kepemimpinan untuk menarik partisipasi masyarakat dalam suatu gerakan sosial. Berdasarkan kajian tentang basis rasionalitas dalam gerakan sosial ini, kemudian Pichardo melihat bahwa terdapat tiga elemen dasar dalam teori mobilisasi sumberdaya tentang proses terjadinya suatu gerakan sosial, yakni: sumberdaya, motivasi, dan lingkungan politik.²⁷

Selanjutnya, terdapat dua model analisis dalam pendekatan Resource Mobilization Theory²⁸ yakni: pertama; *The Political-interactive model*. Model ini dikembangkan oleh Tilly Gamson, Oberschall dan McAdam. Model ini lebih menekankan pentingnya perubahan struktur kesempatan bagi aksi kolektif, keberadaan jejaring, serta kaitan horizontal yang telah terbangun dengan kelompok-kelompok tertindas sebagai faktor penentu keberhasilan gerakan sosial. Model ini menepatkan relasi gerakan sosial dengan negara dan bingkai sistem politik yang ada sebagai determinan yang penting bagi keberhasilan gerakan sosial. Jika negara kuat dan represif, maka gerakan sosial sulit untuk mencapai tujuannya, demikian juga sebaliknya. Pichardo menjelaskan bahwa model ini menekankan pada kapasitas internal dari komunitas untuk menghasilkan organisasi gerakan sosial.²⁹

Comparative Perspectives on Social Movement: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framing, (Cambridge: Cambridge University Press, 1996)

²⁶Nelson A. Pichardo, Resource Mobilization: An Analysis of Conflicting Theoretical Variation, dalam jurnal *The Sociological Quarterly*, Vol.29, No.1 1988, 97-110.

²⁷Nelson A. Pichardo, Resource Mobilization: An Analysis..., 100.

²⁸Nelson A. Pichardo, Resource Mobilization: An Analysis..., 99. Lihat juga Darmawan Triwibowo (ed.), *Gerakan Sosial...*, 11.

²⁹Nelson A. Pichardo, Resource Mobilization: An Analysis..., 99

Kedua, *The Organizational-entrepreneurial Model*, model ini dikembangkan oleh McCarthy dan Zald. Model ini memandang bahwa dinamika organisasi, kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya merupakan faktor yang lebih signifikan dalam menentukan keberhasilan gerakan sosial. Model ini pada dasarnya mengaplikasikan teori pengembangan organisasi untuk menganalisis gerakan sosial. Model ini juga memandang bahwa organisasi formal merupakan karir dari organisasi sosial.

Gerakan sosial akan terjadi dan mampu bertahan dengan mobilisasi sumberdaya (materi dan non-materi) yang ada dalam organisasi. Setiap gerakan sosial harus mampu mengelolah sumber-sumber material seperti tabungan, pekerjaan, penghasilan. Serta sumber-sumber non material seperti wewenang, kepercayaan, persahabatan, komitmen moral, kemampuan dan sebagainya. Sumberdaya ini sangat penting dalam suatu gerakan sosial termasuk juga gerakan dialog keagamaan. Hal ini dikarenakan agar mampu menjaga eksistensi gerakan dalam mencapai tujuan sehingga perubahan yang diinginkan dapat tercapai.

Teori mobilisasi sumberdaya terdiri dari mobilisasi sumberdaya moral, sumberdaya budaya, sumberdaya organisasi sosial, sumberdaya manusia, dan sumberdaya material.³⁰ Bob Edward dan John D. McCarthy menjelaskan secara umum sumberdaya moral adalah legitimasi, dukungan, solidaritas, simpati masyarakat dan tokoh terkenal. Dalam hal ini, legitimasi merupakan dasar dari sumberdaya moral. Karena dukungan, simpati dan solidaritas diperoleh melalui suatu proses legitimasi, dan dalam setiap tahap gerakan sosial terkadang menghadapi kesulitan mendapatkan sebuah legitimasi berupa simpati masyarakat atau dukungan tokoh.³¹

Edward dan McCarthy mengatakan sumberdaya budaya merupakan produk budaya yang dimiliki oleh aktor gerakan sosial. Sumberdaya ini sangat erat kaitannya dengan konsep *stock of knowledge* yang dimiliki oleh aktor gerakan sosial. Kategori ini *cultural resources* termasuk gerakan atau masalah terkait

³⁰Bob Edward dan John D. McCarthy, "Resources and Social Movement Mobilization", dalam David A Snow, et. al., *The Blackwell Companion to Social Movement*, (United Kingdom: Blackwell Publishing, 2004), 125-128.

³¹David A Snow, et. Al., *The Blackwell Companion...*, 125.

produksi seperti musik, pengetahuan, majalah, surat kabar, dan film atau video. Produk budaya seperti ini memfasilitasi perekrutan serta sosialisasi dari gerakan baru penganut dan membantu keadilan kepada mereka kesiapan dan kapasitas untuk bertindak.³²

Edward dan McCarthy menjelaskan sumberdaya organisasi sosial merupakan kategori yang didalamnya termasuk organisasi sosial yang sengaja dibuat secara spesifik untuk mencapai tujuan gerakan. Terdapat tiga hal yang bisa dikategorikan sebagai sebuah sumber daya organisasi sosial yakni: infrastruktur; jaringan sosial; dan organisasi.³³

Dalam setiap organisasi gerakan sosial selalu memiliki kebutuhan dalam mencapai tujuannya. Kebutuhan dalam organisasi gerakan sosial diantaranya seperti legitimasi serta akses dalam memperoleh sumber pendanaan. Melalui kebutuhan sumberdaya manusia, kebutuhan organisasi gerakan sosial dapat terpenuhi. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Edward dan McCarthy bahwa sumberdaya manusia, merupakan kategori yang didalamnya termasuk aktor beserta pengalaman, dan keahliannya. Ini lebih kepada individu-individu yang memiliki sesuatu seperti keterampilan tertentu, keahlian tertentu, dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan suatu gerakan sosial.³⁴

Sumber daya material adalah tipe yang terdiri dari sumber-sumber ekonomi yang umumnya disebut modal finansial dan modal fisik. Termasuk didalamnya antara lain adalah; uang, properti atau bangunan, kantor dan lain sebagainya. Uang merupakan hal yang sangat penting bagi gerakan sosial. Seberapa besarpun sumberdaya lain yang dimiliki atau dukungan anggota, mobilisasi tidak akan berjalan kalau tidak ada yang membiayai.³⁵

Upaya menganalisis dan memahami gerakan sosial pada masyarakat kontemporer dapat juga melalui pendekatan teori proses framing. Teori proses framing baru berkembang pada 1970-an, para akademisi gerakan sosial modern menggunakan teori proses framing dalam memahami sukses dan gagalnya sebuah

³²David A Snow, et. Al., *The Blackwell Companion...*, 126.

³³David A Snow, et. Al., *The Blackwell Companion...*, 127.

³⁴David A Snow, et. Al., *The Blackwell Companion...*, 127.

³⁵David A Snow, et. Al., *The Blackwell Companion...*, 128.

gerakan sosial. Sukses atau gagalnya suatu gerakan sosial terletak sampai sejauh mana pelaku perubahan memenangkan pertempuran atas arti. Pelaku perubahan sosial memiliki tugas penting untuk mencapai tujuan perjuangannya melalui pembentukan framing atas masalah-masalah sosial yang diperjuangkan. Ini merupakan sebuah cara untuk meyakinkan kelompok sasaran yang beragam dan luas agar mereka terdorong untuk melakukan suatu perubahan.

Menurut Robert D. Benford dan David A. Snow, konsep proses framing dewasa ini berkembang dalam berbagai disiplin ilmu sosial seperti psikologi khususnya psikologi kognitif, linguistik, komunikasi dan studi media, ilmu politik dan studi kebijakan, dan sosiologi. Dalam sosiologi, konsep framing khususnya digunakan dalam gerakan sosial dan tindakan kolektif.³⁶ Pembentukan framing merupakan penentu suksesnya gerakan sosial. Snow dan Benford menekankan dua komponen penting dalam mem-framing gerakan, yaitu, diagnosis elemen atau mendefinisikan masalah dan sumbernya dan prognitis elemen, mengidentifikasi strategi yang tepat untuk memperjuangkan masalah tersebut.³⁷ Pada komponen diagnosis elemen, para aktor gerakan sosial harus mampu mendefinisikan masalah-masalah sosial yang menjadi fokus dalam gerakan sosial yang mereka lakukan. Selain mendefinisikan masalah-masalah sosial apa saja, aktor gerakan sosial juga harus mampu mengetahui sumber apa yang menyebabkan timbulnya masalah sosial tersebut. Setelah aktor-aktor gerakan sosial mampu memahami masalah sosial yang terjadi dan sumber dari masalah sosial tersebut. Selanjutnya, pada komponen prognitis elemen, aktor gerakan sosial harus mampu merumuskan dan melaksanakan strategi dan taktik yang tepat agar dapat melakukan perubahan sosial yang diharapkan.

Untuk mencapai sebuah kelompok sasaran, aktor gerakan membutuhkan alat dalam menjalankan framing, yaitu media. Berbagai media bisa seperti media cetak dan elektronik, buku, pamflet. Bahkan aktivis gerakan juga

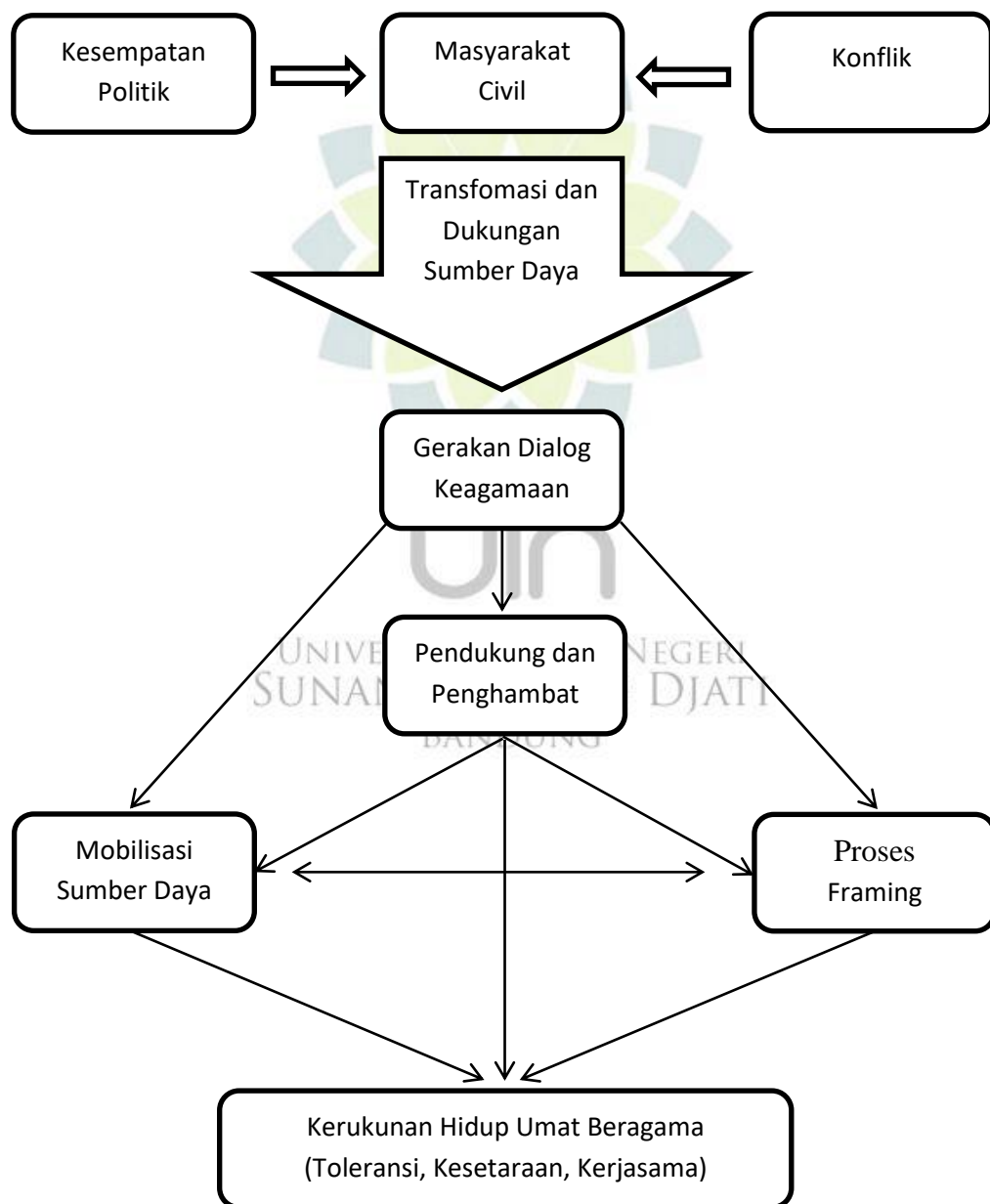
³⁶Robert D. Benford and David A. Snow, "Framing Processes and Social Movement: An Overview and Assessment", *Annual Review of Sociology*, Vol.26, 2000, 611.

³⁷Abdul Wahib Situmorang, *Gerakan Sosial: Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 41-42.

mempergunakan warung kopi, cafe dan ruang-ruang pertemuan sebagai media dalam menyalurkan framing gerakan mereka.

Berdasarkan kedua teori di atas, teori mobilisasi sumber daya dan teori proses framing, diharapkan dapat memotret gerakan dialog keagamaan yang dilakukan JAKATARUB di Kota Bandung. Untuk lebih mudah memahami kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagan berikut:

Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran Penelitian



F. Langkah-langkah Penelitian

1. Objek dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini adalah Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (JAKATARUB) Kota Bandung. Dengan fokus yang diteliti ialah gerakan dialog keagamaan yang digagas dan dipraktikkan oleh JAKATARUB Kota Bandung. Didirikannya JAKATARUB bermula dari serangkaian workshop tentang keberagaman dan toleransi yang diadakan *Institute for Culture and Religion Studies* (INCRoS) dan Masyarakat Dialog Antar Agama (MADIA) pada 10-12 November 2000 di Pesantren Al-Wasilah, Garut. Selanjutnya workshop dilaksanakan kembali pada 20-22 April 2001 di Vihara Vipassana Graha, Lembang.

Rangkaian workshop ini muncul atas niatan para tokoh agama serta budayawan nasional dari Jawa Barat yang didukung oleh alm. K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Tujuan diadakannya workshop adalah demi mendorong kerukunan agama dalam konteks pengenalan yang mendalam sekaligus kerja sama yang strategis. Workshop ini dihadiri oleh sejumlah pemimpin agama dan kaum muda dari berbagai komunitas keagamaan di Jawa Barat.

Para peserta workshop ini kemudian bersepakat untuk membentuk suatu jaringan kerja antar umat beragama. Sehingga pada 12 Mei hingga 30 Juni 2001 diadakan beberapa kali pertemuan berkala yang difasilitasi Gereja Katolik Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria Bandung untuk mendiskusikan pendirian jaringan tersebut. Pada pertemuan ketiga tersebut mulai dibicarakan tentang format atau wadah demi keberlangsungan kerja transformatif dialog antaragama, yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Jakatarub.

Sejak tahun 2014 JAKATARUB memusatkan semua aktivitas dan programnya pada empat tema, yaitu: Diskusi teologis, Elaborasi Seni dan Budaya, Kampanye Media dan Pengayaan Konsep dan Wawasan Kebangsaan. Keempat tema ini bertujuan untuk memperluas serta memperdalam pemaknaan toleransi di berbagai segmen masyarakat dengan melibatkan banyak komunitas dan individu dalam mengerjakannya. Sampai sekarang JAKATARUB tetap eksis dengan program dan kegiatan-kegiatannya. Saat ini Jakatarub telah bermitra aktif dengan

Lembaga Keagamaan, Lembaga/komunitas kebudayaan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga pendidikan.

Penelitian ini dilakukan di Kota Bandung. Hal ini dikarenakan Kota Bandung merupakan basis daerah dan tempat Jaringan Kerja Antarumat Beragama (JAKATARUB) melakukan kegiatan. Beberapa tempat di Kota Bandung seperti Cafe Kaka Kota Bandung dan sekretariat Jakatarub di Kompleks Permata Biru Blok X-214, Cinunuk, Cileunyi, akan menjadi fokus lokasi dari penelitian ini. Kedua tempat ini merupakan tempat yang sering digunakan pengurus dan keluarga JAKATARUB untuk melaksanakan kegiatannya.

2. Sumber Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini juga adalah jenis data kualitatif, yaitu data yang terdiri dari tindakan, kata-kata dan data tertulis seperti dokumen, buku, majalah yang relevan dengan pokok masalah yang dibahas.³⁸

Berdasarkan sifatnya, sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber Primer merupakan sumber pokok dan utama atau berasal dari tangan pertama. Sumber primer dalam penelitian ini ialah hasil observasi langsung terhadap aktivitas dialog keagamaan yang dilakukan JAKATARUB. Hasil wawancara langsung dengan para pengurus dan beberapa anggota Jakatarub. Serta dokumen-dokumen JAKATARUB yang berkaitan dan mendukung dalam pembahasan yang diteliti juga merupakan sumber primer penelitian ini.

Sumber data primer terdiri dari aktor-aktor tertentu yang benar-benar mengetahui objek yang akan diteliti dan diwawancarai oleh peneliti yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Metode seperti ini disebut juga *purposive sampling*. Pemilihan *purposive sampling* merupakan pemilihan siapa subjek yang

³⁸Romdon, *Metodologi Ilmu Perbandingan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 134.

ada dalam posisi terbaik untuk memberi informasi yang dibutuhkan. Peneliti memilih sampel berdasarkan penilaian atas karakteristik anggota sampel yang dengannya diperoleh data yang sesuai dengan maksud penelitian.³⁹

b. Sumber Sekunder

Data sekunder atau data tambahan dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang dialog keagamaan dan gerakan-gerakan keagamaan baik yang ditulis di Indonesia atau negara lain. Berbagai penelitian seperti jurnal dan tesis yang berkaitan dengan objek atau hampir mirip dengan objek penelitian ini. Serta berbagai bacaan yang relevan dengan fokus penelitian seperti majalah, koran dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang berupa data primer dari pengurus dan beberapa anggota JAKATARUB adalah dengan observasi dan wawancara mendalam. Sedangkan untuk data sekunder yang berupa teori, pandangan-pandangan, hasil penelitian, buku dan catatan-catatan didapatkan dengan menggunakan teknik dokumentasi dan studi kepustakaan.

a. Observasi

Pada tahap observasi, peneliti secara langsung turun ke lokasi penelitian. Tahap ini dilakukan untuk menyaksikan dan mengamati bagaimana gerakan dialog keagamaan Jakatarub Kota Bandung. Strategi dan taktik seperti apa yang dilakukan aktivis gerakan dialog keagamaan JAKATARUB untuk menggapai tujuannya. Serta faktor-faktor apa yang menghambat dan mendukung gerakan dialog keagamaan yang dilakukan oleh JAKATARUB. Dengan menyaksikan secara langsung gerakan dialog keagamaan JAKATARUB ini, maka penulis dapat dengan mudah mendeksripsikan masalah penelitian.

Observasi dilakukan guna memperoleh data secara langsung dari sumber pertama atau primer. Khususnya untuk melihat gambaran dialog keagamaan yang dilakukan oleh JAKATARUB. Peneliti melakukan observasi awal dengan mengamati kegiatan-kegiatan dialog keagamaan JAKATARUB yang

³⁹ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), 272.

mengandalkan pengamatan dan ingatan peneliti. Akan tetapi untuk mempermudah pengamatan dan ingatan maka peneliti menggunakan beberapa hal untuk membantu selama proses observasi berlangsung. Diantaranya: 1). Melakukan pencatatan mengenai hal-hal yang dirasa penting dalam proses observasi sehingga mempermudah peneliti untuk mengingat dan menemukan kembali data yang telah diperoleh yang selanjutnya akan dituangkan dalam penulisan penelitian. 2). Alat elektronik berupa smartphone yang didalamnya sudah dapat mengambil gambar dan merekam suara. Karena tidak semua data dapat ditulis berupa catatan-catatan mengingat durasi waktu observasi yang tidak sebentar.

Berdasarkan data yang diperoleh selama observasi, selanjutnya peneliti gunakan sebagai bahan untuk mendalami dan mengkaji data lebih dalam lagi. Sehingga apabila masih terdapat kekurangan-kekurangan data dapat dicari dan diperoleh serta diperjelas kembali dalam proses wawancara untuk menguatkan data hasil yang diperoleh selama observasi.

b. Wawancara

Selain observasi, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa informan yang memiliki kualitas pengetahuan dan keterlibatan dalam gerakan dialog keagamaan JAKATARUB Kota Bandung. Sebelum melakukan wawancara, peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan masalah penelitian ini. Dalam melakukan wawancara sendiri tidak semuanya dilakukan secara terstruktur dikarenakan realitas ranah yang dinamis.

Wawancara baik terstruktur maupun tidak terstruktur dilakukan untuk mengetahui makna, pandangan, pendapat, keterangan atau kenyataan-kenyataan yang dilihat dan dialami oleh responden atau informan. Wawancara dilakukan secara mendalam sehingga diperoleh data primer yang langsung berasal dari informan. Teknik wawancara dilakukan secara terbuka, akrab dan kekeluargaan, sehingga selama proses wawancara tidak berlangsung kaku, agar data yang diperoleh lebih maksimal.

Wawancara dalam penelitian ini juga menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara agar tetap sesuai dengan fokus penelitian. Perangkat yang digunakan pada wawancara dalam penelitian ini adalah alat pengumpul data berisi

pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada para informan, perekam suara dan pengambilan gambar.

Terdapat enam informan yang peneliti wawancarai yang terdiri dari pendiri dan pengurus JAKATARUB Kota Bandung. Keenam informan yang diwawancarai tersebut disesuaikan dengan basis modalitas yang dimiliki masing-masing informan. Informan-informan tersebut ialah: Wawan Gunawan, Firman Prianto, Risdo Simangunsong, Sonny Hermawan, Yunita Chen, dan Lioe Kim Yie.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan hal yang paling penting dalam melakukan penelitian. Karena dengan melakukan pendokumentasian terhadap pengamatan lokasi penelitian, perekaman saat wawancara dan pengarsipan data penelitian, memiliki kegunaan untuk dijadikan rujukan kembali pada saat menuliskan laporan penelitian. Dokumentasi penelitian menjadi sebuah bukti bahwa peneliti benar-benar telah melakukan penelitian.

Dokumentasi dilakukan terutama untuk melengkapi dan menguatkan data. Peneliti juga melakukan perekaman secara audio-visual guna mendapatkan dokumentasi sebagai pendukung penelitian dan alat bantu observasi. Perekaman suara juga dilakukan pada saat proses wawancara. Dari perekaman ini akan dijadikan data pendukung untuk melakukan analisis data.

4. Teknik Analisis Data

Sebelum menganalisis data terlebih dulu dilakukan pengumpulan dan klasifikasi seluruh data yang didapat yang berhubungan dengan penelitian. Pada tahap pengumpulan data, seluruh data yang sudah diperoleh selama observasi dan wawancara di lapangan dilakukan menurut klasifikasinya masing-masing. Peneliti mengelompokkan seluruh data yang diperoleh baik berupa arsip-arsip, catatan-catatan lapangan, gambar atau foto, beserta dokumen-dokumen pendukung lainnya kedalam beberapa kelompok berdasar pada fokus permasalahan yang akan diteliti. Klasifikasi data tersebut dilakukan guna mempermudah peneliti dalam menganalisis data pada tahap berikutnya.

Setelah data terkumpul dan diklasifikasi, peneliti kemudian menganalisis dengan menggunakan teori yang telah ditentukan. Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif melalui proses: *Data Reduction, Data Display, dan Verification*.⁴⁰

a. Reduksi Data

Mereduksi data yang didapat untuk memilih data yang berhubungan dengan permasalahan dan data yang tidak berhubungan dengan permasalahan. Peneliti melakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan lain-lain terhadap data. Apabila dalam proses reduksi data ternyata data yang diperoleh kurang lengkap maka peneliti melakukan pencarian data tambahan dengan cara studi kepustakaan, wawancara ulang atau pengamatan kembali untuk melengkapi data.

Langkah-langkah yang peneliti gunakan dalam tahap reduksi data, ialah: *pertama*, data-data yang telah terkumpul dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dipilih dan dikelompokkan sesuai dengan pertanyaan instrumen penelitian. *Kedua*, peneliti menjawab pertanyaan pada instrumen penelitian sesuai dengan data.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan setelah peneliti selesai melakukan reduksi pada seluruh data yang diperoleh. Data yang telah ada sesuai dengan instrumen penelitian kemudian peneliti narasikan sesuai dengan data. Selanjutnya dideskripsikan secara spesifik mengenai fokus masalah dari penelitian. Penyajian data dilakukan dengan menggambarkan data secara tersusun dan menarik kesimpulan dalam bentuk teks naratif. Dengan melakukan cara ini mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi. Sehingga bisa merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.

Penyajian data berupa kumpulan informasi yang tersusun yang memberikan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data ini meliputi berbagai

⁴⁰Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV.Alfabeta, 2013), 25.

jenis gambar, keterkaitan penjelasan mengenai permasalahan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, pembahasan dan hasil penelitian, terakhir kesimpulan dan saran dari penelitian.

c. Verifikasi Data

Verifikasi data dilakukan guna membaca dan melihat kembali hasil data yang ada. Pada tahap verifikasi data ini ditinjau kembali kesesuaian data dengan permasalahan dan instrumen penelitian, serta kesesuaian dengan teori. Tahap ini akan lebih membantu dalam menarik kesimpulan yang lebih komprehensif nantinya.

